

# INKONSISTENSI DIPLOMASI ISLAM DI DALAM LIGA ARAB

**Yulia Rimapradesi**  
Universitas Darussalam Gontor  
[yuliarimapradesi@unida.gontor.ac.id](mailto:yuliarimapradesi@unida.gontor.ac.id)

**Surwandono**  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
[surwandono@umy.ac.id](mailto:surwandono@umy.ac.id)

## *Abstract*

*The Arab League is an organization that articulates Islamic messages and norms in the practice of International Relations. The central idea of the Arab League is reflected in the norms to carry out the politics of liberation of Palestima as a community whose existence must be fought for. However, in the context of conflict in the Middle East region especially post Arab Springs, the behavior and policies of the Arab League have received a very sharp spotlight in the practice of International Relations. This article explains the inconsistent practice of Islamic diplomacy in the case of intervention in Libya and Syria, which then results in a decline in the quality of humanity in Syria and Libya. This article finds that the Arab League has violated the norms of Islamic diplomacy such as muamalah bil misli in the form of double standard practices, and the norm of wafa 'bil ahdi in the form of inconsistencies in carrying out basic organizational norms.*

**Keywords:** *Islamic Diplomacy, Islamic Norms, Arab League.*

## Abstrak

Liga Arab merupakan organisasi yang mengartikulasikan pesan dan norma Islam dalam praktik Hubungan Internasional. Gagasan sentral Liga Arab tercermin dalam norma untuk melakukan politik pembebasan Palestina sebagai komunitas yang harus diperjuangkan eksistensinya. Namun dalam konteks konflik di kawasan Timur Tengah, pasca Arab Springs, perilaku dan kebijakan Liga Arab mendapatkan sorotan yang sangat tajam dalam praktik Hubungan Internasional. Artikel ini hendak menjelaskan praktik ketidakkonsistenan diplomasi Islam dalam kasus intervensi ke Libya dan Syria, yang kemudian berakibat kepada kemunduran kualitas kemanusiaan di Syria dan Libya. Artikel ini menemukan bahwa Liga Arab telah melanggar norma diplomasi Islam seperti muamalah bil misli dalam bentuk praktik standar ganda, dan norma *wafa' bil ahdi* dalam bentuk ketidakkonsistenan menjalan norma dasar organisasi.

**Kata kunci:** *Diplomasi Islam, Norma Islam, Liga Arab.*

## Latar Belakang

Liga Arab merupakan sebuah organisasi regional di kawasan Timur Tengah. Berakhirnya perang dunia ke dunia, menginisiasi negara-negara kawasan Timur Tengah untuk mendirikan sebuah organisasi regional dengan harapan memiliki wadah untuk memenuhi program-program politik, budaya, sosial, ekonomi, hingga sebagai penengah jika ada perselisihan di antara negara Arab maupun dengan pihak ketiga (Ahmad, 2016). Pembentukan Liga Arab ini berada di tengah-tengah situasi perang dunia ke 2. Gagasan ini didukung oleh Inggris pada 1942. Dengan alasan, Inggris ingin menggalang negara-negara Arab untuk ikut bergabung dengan pihak Sekutu. Namun negara-negara Arab tidak begitu berminat dengan ajakan Inggris untuk naik ke oktagon Perang Dunia II (Firman, 2019).

Meskipun demikian, Negara-negara Arab, dalam catatan Council of Foreign Relation, justru melihat dukungan Inggris ini sebagai motivasi untuk segera membentuk kesatuan pan-Arab yang akan meningkatkan dukungan

bagi orang-orang Arab Palestina (Al-Marashi, 2018). Proses ini memuncak pada 1944 saat Protokol Alexandria, sebagai cetak biru pendirian Liga Arab, ditandatangani lima negara, yaitu Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Transjordan (kini Yordania), Yaman, dan Arab Saudi. Sampai akhirnya, beberapa bulan sebelum Perang Dunia II usai, pada 22 Maret 1945, tepat hari ini 74 tahun lalu, kelima negara Arab itu resmi mendirikan Al-Jāmi'a Al-'Arabīyah atau Liga Arab di Kairo.

Di awal pendirian liga, masalah yang dibahas adalah seputar pembebasan negara-negara Arab dari kolonialisme serta mencegah komunitas Yahudi di Palestina untuk mendirikan negara Israel. Lalu berlanjut ke perjanjian kerja sama militer dan ekonomi (Barnidge, 2018). Delapan tahun setelah pembentukan liga, keanggotaannya bertambah. Mulai dari Libya (1953); Sudan (1956); Tunisia dan Maroko (1958); Kuwait (1961); Aljazair (1962); Bahrain, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (1971); Mauritania (1973); Somalia (1974); Organisasi Pembebasan Palestina (PLO, 1976); Djibouti (1977); dan Komoro (1993).

Bukan hanya itu, Liga Arab juga merupakan organisasi regional yang mendukung kemerdekaan negara-negara Timur Tengah untuk merdeka dari kolonialisme barat. Pada 1945 Liga Arab mendukung Suriah dan Lebanon mengakhiri penjajahan Perancis dan mendukung kemerdekaan Libya. Pada 1961 mendukung Tunisia dalam konfliknya dengan Perancis. Saat Israel mendeklarasikan kemerdekaannya dan membentuk negara Yahudi pada 1948, lima negara pendiri bertempur melawan Israel dalam Perang Arab-Israel 1948. Konflik itu menandai aksi besar pertama persembahan Liga Arab. Kemudian, negara-negara anggota Liga Arab pernah mengadakan boikot minyak kepada negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Arab-Israel 1973 menjadi salah satu pencapaian Liga Arab yang paling berpengaruh dunia (Rickenbacher, 2020).

Meskipun banyak catatan dari organisasi Liga Arab yang tidak optimal dalam menghadapi konflik internal negara-negara anggotanya, seperti Mesir

pernah dikucilkan Liga Arab gara-gara Presiden Anwar Sadat menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel pada 26 Maret 1979. Dalam kasus krisis Suriah dan Lebanon selama 29 tahun (1976-2005), tentara Suriah menduduki Lebanon. Liga Arab sudah bergerak dengan mengirim pasukan perdamaian, tetapi diusir pasukan Suriah. Akan tetapi, yang akan digaris besarkan dalam tulisan ini adalah mencoba mengambil nilai dari Diplomasi dalam Islam. Di mana kawasan Timur Tengah merupakan perspektif negara-negara dengan mayoritas muslim. Maka dari itu, tulisan ini akan mencoba menganalisa seberapa kuat penerapan diplomasi dan nilai politik islam didalam peraktek Liga Arab di dunia Internasional.

### **Studi Literatur**

Dalam Guide to Diplomatic Practice tulisan Sir Earnest Satow mengatakan bahwa diplomasi merupakan penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dengan negara-negara berdaulat (Satow, 1917). Unsur pokok diplomasi adalah negoisasi. Negoisasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga serta memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin dan dilaksanakan secara damai, pemeliharaan perdamaian dengan tanpa merusak kepentingan nasional merupakan tujuan utama diplomasi. Teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk mempersiapkan perang bukan untuk menghasilkan perdamaian. Diplomasi berhubungan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara. Diplomasi modern berhubungan erat dengan sistem negara. Diplomasi tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara (Roy, 1995). Dalam persefektif barat, diplomasi dibagi menjadi dua, yaitu Soft Diplomacy dan Hard Diplomacy. Dimana Soft Diplomacy ini diplomasi dalam bentuk penyelesaian secara damai dalam bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan dan ekonomi. Sedangkan Hard Diplomacy berorientasi pada bentuk perang, yaitu agresi militer dan politik.

Dalam perspektif islam, diplomasi sejatinya berkaca pada praktik Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Dalam Q.S Al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”*

Jika kita terjemahkan prinsipnya mengandung tentang kemuliaan manusia karamah insaniyah, kesatuan umat manusia, kerjasama kemanusiaan, toleransi, kemerdekaan budi baik, keadilan, perlakuan yang sama, memenuhi perjanjian, dan kasih sayang. Dan memiliki tujuan dakwah, politik, perdagangan, militer, budaya dan perluasan wilayah. Yang pernah dicontohkan Rasulullah dalam bentuk surat, sebagai media diplomasi pada saat itu dimana lebih dari 50 surat yang dikirim dari pihak Rasulullah ke berbagai pemimpin negara. Contohnya Surat ke Negus Ethiopia, Binyamin (al-Muqawqis) Mesir, Khosrau II di Persia, Hercules Romawi dan Uskup Dhugatir. Kemudian mengirim utusan, utusan yang dianggap duta pertama juga dalam islam ialah Mush'ab Bin Umair yang diutus ke Madinah.

Studi diplomasi Islam telah banyak dilakukan oleh para fuqaha maupun para teorist yang baik dalam konteks normatif maupun dalam konteks praktis. Gagasan normatif tentang diplomasi telah diformulasikan dengan sangat sistematis oleh Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya al-'alaqah ad-daulah fi al-Islam ke dalam 10 prinsip seperti Karamah al-insaniyah, ta'awun insani, hurriyah, mu'amallah bil misli, ummatan wahidan, wafa' bi al-ahdi, fadhillah, 'adalah, tasamuh, sakinah mawaddah, wa rahmah yang dikutip Surwandono et.al dalam mengkaji interaksi sistem internasional dalam Islam (Surwandono et al., 2018).

Kajian diplomasi Islam juga banyak digagas oleh para Sufi, sebagaimana diketahui para Sufi sesungguhnya adalah komunitas yang lebih mementingkan interaksi hubungan manusia dengan Tuhannya, dibandingkan interaksi sesama manusia. Namun dalam konteks studi Sufi modern, interaksi manusia dengan Tuhannya juga sangat ditentukan oleh kualitas interaksi sesama manusia. Dunia yang semakin menunjukkan pola yang anarkhistik dan materialistik menjadi pemicu para Sufi untuk menyusun sejumlah prinsip diplomasi dalam Islam (Bidabad, 2011). Gagasan yang ditawarkan dalam mengelola dunia yang semakin jauh dari suasana keharmonisan, perlunya ditanamkan nilai spiritualitas dan moralitas keagamaan (Bidabad, 2012).

Gagasan tentang diplomasi religius telah dibentuk pemerintah Turki semenjak tahun 2002. Gagasan diplomasi religius Turki mampu menempatkannya menjadi negara yang otonom dan memiliki arah politik luar negeri yang jelas. Turki menjadi negara yang artikulatif dalam menyuarakan pentingnya moralitas keagamaan dalam praktik diplomasi internasional (Ozkan, 2014). Diplomasi keagamaan adalah diplomasi yang secara konsisten untuk menjalankan nilai keagamaan dalam nilai praktik politik kepada siapapun. Bila memang negara harus mengkritik negara lain, atau lembaga internasional, landasan argumen tidak semata didasarkan kepada argumen kepentingan nasional semata, namun juga oleh moralitas keagamaan.

Gagasan diplomasi Islam yang konsisten terhadap peneguhan terhadap nilai-nilai luhur dalam bentuk kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Studi Tulus Warsito dan Surwandono menunjukkan bahwa diplomasi Islam yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah praktik diplomasi bersih. Diplomasi yang mengedepankan tata kelola diplomasi yang memberikan keuntungan bagi semua pihak, sebagai bagian dari implementasi norma Fadhillah, di mana diplomasi bukan semata untuk mendapatkan keuntungan sepihak namun memberikan keuntungan ke sejumlah pihak (Warsito & Surwandono, 2015).

## Pembahasan

Dalam perkembangan awalnya, Liga Arab berkonsentrasi terutama pada program ekonomi, budaya, dan sosial. Pada tahun 1959 itu mengadakan kongres perminyakan Arab pertama dan pada tahun 1964 mendirikan Organisasi Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmiah Liga Arab (ALECSO). Juga pada tahun 1964, meskipun ada keberatan oleh [Jordan](#), liga tersebut memberikan status pengamat PLO sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Palestina. Ini ditingkatkan menjadi keanggotaan penuh pada tahun 1976. Berdasarkan Piagam Liga Arab, tujuan utama organisasi ini adalah “penguatan hubungan antara negara-negara anggota, koordinasi kebijakan mereka untuk mencapai kerjasama antara mereka dan untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan Negara-negara Arab”. Piagam Liga Arab juga melarang para anggota untuk menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain. Liga Arab telah aktif dalam membantu dunia Arab mengembangkan perekonomian dan budaya, sekaligus menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik baik di dalam liga maupun dari eksternal. Organisasi ini berusaha untuk menyelesaikan isu-isu yang muncul antara Negara-negara Arab, dan untuk memperbaiki citra keseluruhan negara-negara muslim di dunia saat ini. Pandangan dunia internasional terhadap mereka yang konotasinya adalah sebuah organisasi yang penuh dengan teror dan kekacauan yang sering kali didengar di negara-negara Barat, maka dari itu, Liga Arab terus berjuang untuk mengubah persepsi tersebut (Al-Muallem, 2020).

Organisasi Liga Arab memiliki kesempatan untuk memainkan peran diplomatik yang signifikan dalam mendorong status kenegaraan Palestina di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan pemberontakan di banyak negara Arab di awal tahun 2010-an. Beberapa pengamat memuji tindakan Liga Arab selama revolusi 2011 di Libya, di mana ia mendukung penggulingan Muammar al-Qaddafi. Akan tetapi yang lain mengkritik diplomasi Liga Arab yang gagal di Suriah (Lundgren, 2020) dan tanggapannya yang retak karena

adanya kebangkitan ISIS yang memproklamirkan diri dan saat ini kelompok tersebut ancaman terorisme paling nyata di dunia (Debre, 2020).

Kemudian dalam konflik antara Palestina dan Israel Liga Arab selalu hadir di posisi Palestina dengan memberi bantuan hingga dukungan dalam sidang-sidang yang diadakan PBB atas usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Akan tetapi pada pertengahan menjelang akhir tahun 2020 ini, tiga negara anggota Liga Arab yaitu Bahrain, Uni Emirat Arab dan Sudan telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Padahal, dalam inisiatif bersama, negara anggota Liga Arab menolak normalisasi hubungan dengan Israel sampai kemerdekaan Palestina terwujud. Dan akibat hal tersebut juga, menyebabkan merosotnya bantuan pendanaan dari negara-negara Arab kepada otoritas Palestina. Rinciannya, bantuan pendanaan dari negara-negara Arab kepada Otoritas Palestina turun 85 persen, dari 267 juta dolar AS pada 2019 menjadi 38 juta dolar AS pada 2020, dalam tujuh bulan pertama 2020. Bantuan dana dari luar negeri turun 50 persen di periode yang sama, dari 500 juta dolar AS pada 2019 menjadi 255 juta dolar AS pada 2020. Dimana hal tersebut sebagian besar negara-negara Arab tidak mematuhi keputusan KTT Arab untuk memberikan jaring pengaman finansial sebesar 100 juta dolar AS untuk Palestina (Mukhtar, 2020).

### **Kelemahan Diplomasi Islam Liga Arab**

Jika kita berkaca pada kelemahan dari keputusan-keputusan yang diambil liga Arab, secara skeptis banyak fakta yang mengatakan Liga Arab belum mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan diawal mula tujuan terbentuknya organisasi regional ini. Hingga saat ini dunia Arab penuh dengan konflik regional, bilateral, dan domestik, dari pantai Samudra Atlantik hingga Teluk Arab. Ketegangan Maroko-Aljazair terkait sengketa Sahara Barat dan peran Front Polisario masih belum terselesaikan. Libya telah menjadi negara gagal, lahan subur bagi ekstremis dan terorisme, dengan konsekuensi sub-regional. Suriah adalah medan perang berdarah, meskipun upaya diplomatik intensif disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Irak



masih gelisah, dengan teroris yang dapat beroperasi melintasi perbatasan antara Irak dan Suriah. Konflik sipil terus melanda Yaman, seperti halnya perang di Suriah, pertempuran di sana memperburuk ketegangan antara kekuatan regional Arab Saudi dan Iran. Konflik Arab-Israel, hampir tujuh dekade, terus membuat hidup tak tertahankan bagi warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan. Mesir dan Tunisia, negara-negara yang memicu kebangkitan Arab, sedang mengalami transformasi domestik yang mendasar (Fahmy, 2015).

Muamallah bil Misli yang Lemah Yang Ditandai Dengan Standar Ganda. Pengertian secara luas Standar Ganda yaitu perbedaan cara pandang ketika menghadapi sebuah situasi yang serupa sering diistilahkan sebagai standar ganda. Konsep tersebut telah berkembang sejak abad ke-19 yang mulanya dipakai untuk menganalisis perbedaan hak pria dan wanita. Secara umum, standar ganda merupakan perbedaan sikap dan perilaku yang diaktualisasikan dalam sebuah situasi dan kondisi yang serupa. Di satu sisi, seseorang akan menyikapi sebuah kondisi dengan cara dan refleks tertentu. Di sisi lain, orang tersebut memberikan sikap yang berbeda atas kondisi yang persis sama yang hanya memiliki perubahan pada satu/dua faktor.

Dalam tulisan yang berjudul Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat Terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013 misalnya, sebuah analisis nyata dimana Amerika Serikat memberlakukan standar ganda dalam pengambilan keputusan. Dilema diplomatik yang dihadapi oleh Amerika Serikat pada saat krisis pergantian rezim Muhammad Mursi oleh Al-sisi, telah mendorong Amerika Serikat untuk melakukan standar ganda pada kasus Mesir. Dimana dilema yang dialami Amerika Serikat datang dari kondisi eksternal dan internal Amerika sendiri dalam masalah perekonomian, hutang, dan perumusan anggaran Amerika Serikat mengharuskan Amerika Serikat memotong bantuan luar negerinya kepada pemerintahan para perwira Mesir. Meskipun bantuan luar negeri telah dipotong, tetap saja predikat standar ganda tidak bisa dilepaskan karena

Amerika Serikat masih tidak ingin mengakui bahwa kasus Mesir merupakan sebuah kudeta dan Amerika Serikat juga mengakui Al-Sisi sebagai pihak oposisi secara demokratis adalah presiden yang sah. Dalam tulisan ini menyampaikan, konsep Standar Ganda sebenarnya dapat muncul dari dorongan teori Pilihan Rasional, dimana secara realistis suatu negara akan mengambil keputusan dengan posisi paling sedikit resiko bagi negaranya (Setiawan, 2015).

Mimpi mewujudkan dunia yang damai ada dikawasan Timur Tengah dengan adanya Organisasi Regional sebagai pusat pemerintahan antar negara dikawasan regional seolah-olah masih menjadi angan atau mimpi semata. Dibuktikan banyaknya kegagalan diplomasi Liga Arab dikawasan tersebut dan salah satu contoh fatal dengan adanya kebangkitan organisasi terorisme yang paling nyata di dunia yaitu ISIS. Pada 2013 Liga Arab mendukung kelompok oposisi di Suriah dimana hasil KTT Doha pada Maret 2013 Liga Arab memberikan hak bagi negara anggotanya untuk memberi dukungan berupa pemasokan senjata dan pertahanan diri terhadap kelompok oposisi Suriah yang dianggap sebagai penyimpangan dari upaya penyelesaian masalah politik Suriah. Kebijakan tersebut diambil atas dominasi Negara Arab Saudi dan Qatar dalam keanggotaan Liga Arab yang memiliki kepentingan terutama adanya tekanan dari Amerika Serikat (Ardhiyanto, 2014).

Padahal pada permasalahan politik sebelumnya di Libya, Musim Semi Arab (The Arab Spring) 2011 ditandai dengan unjuk rasa masal yang menginginkan pemimpin Libya, Muammar al-Qaddafi, mundur dari jabatannya. Qaddafi merespon dengan keras para penentangannya sampai akhirnya memantik perang sipil. Liga Arab memilih mengambil sikap melindungi kelompok oposisi dan turut menginginkan agar Qaddafi sebaiknya mundur. Pada Maret 2011 Liga Arab memberlakukan zona [larangan terbang](#) di langit Libya dengan harapan menghentikan serangan udara Qaddafi pada rakyatnya sendiri. Dalam perkembangannya zona larangan terbang berkembang menjadi semacam legitimasi bagi Barat untuk mengintervensi Libya dan menggulingkan Qaddafi pada Agustus 2011. Ini

menunjukkan masih adanya standar ganda yang diterapkan Liga Arab dalam mengambil keputusan. Masih adanya pengaruh dan kepentingan dari internal negara anggota Liga Arab membuat sikap yang diambil tidak searah dengan sikap pada permasalahan di Suriah.

Sikap Standar Ganda bukanlah sebuah solusi permasalahan kehidupan, terutama yang ditujukan dalam islam. Dalam upaya mengubah alur dinamika kehidupan serta menyelesaikan berbagai problematika yang muncul, dibutuhkan komitmen, konsisten, serta konsekuen. Konsisten merupakan sebuah sikap anti Standar Ganda yang mampu secara efektif menjaga ritme masing-masing individu agar tetap sesuai dengan idealisme awal yang telah menjadi komitmen sebelumnya. Politik standar ganda tidak hanya mengenai perbedaan cara menanggapi, namun juga perbedaan mengenai korelasi perkataan dengan perbuatan. Allah SWT berfirman dalam menyikapi orang-orang tersebut dengan sikap kabura maktan, yakni kemurkaan level tinggi yang tiada terbayangkan bagi para hamba-Nya (Sanjaya, 2015).

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Barangsiapa yang ingin melaksanakan kebaikan namun dia tidak mengamalkannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan sempurna di sisi-Nya. Jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya maka Allah akan mencatatnya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Jika dia berniat berbuat maksiat, kemudian dia tidak melaksanakannya maka baginya satu kebaikan penuh, sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu maksiat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

### **Tidak Terimplementasikannya Norma Wafa' bil Ahdi**

Dalam konflik Palestina dan Israel dalam inisiatif bersama, negara anggota Liga Arab menolak normalisasi hubungan dengan Israel sampai

kemerdekaan Palestina terwujud dan mematuhi keputusan KTT Arab untuk memberikan jaring pengaman finansial sebesar 100 juta dolar AS untuk Palestina. Bantuan ini digunakan untuk membantu Presiden Mahmoud Abbas menangani krisis keuangan di Palestina. Krisis keuangan Palestina terjadi sejak PBB meningkatkan status Palestina sebagai negara pengamat non-anggota pada 30 November 2012 lalu (Hardoko, 2012).

Akan tetapi, dunia dikejutkan pada keputusan UEA yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Pada 9 September pada 2020, Liga Arab menggelar pertemuan level menteri luar negeri (menlu) untuk membahas permintaan Palestina agar rapat darurat menolak kesepakatan normalisasi UEA dan Israel. Namun permintaan Palestina itu ditolak oleh Bahrain. Pernyataan akhir pertemuan Liga Arab itu tidak mengancam normalisasi dengan Israel dan sebaliknya memperbarui komitmennya pada Prakarsa Perdamaian Arab 2002, yang merupakan bagian dari hasil KTT Liga Arab di Beirut dan disahkan kembali pada KTT tahun 20017 dan 2017. Inisiatif tersebut menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan penarikan Israel dari semua wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967 (termasuk Tepi Barat , Gaza , Dataran Tinggi Golan , dan Lebanon ), sebuah "pemukiman yang adil" bagi pengungsi Palestina. masalah berdasarkan Resolusi PBB 194 , dan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Namun inisiatif tersebut ditolak oleh Israel, meski inisiatif tersebut telah diperbaharui lagi pada tahun 2017, Israel tetap menolak dan hal tersebut yang menyebabkan renggang hubungan antara Israel dan negara-negara anggota Liga Arab sampai saat sebelum terjadinya beberapa normalisasi di tahun 2020 (Terje Rød-Larsen, 2014).

Setelah keputusan Uni Emirat Arab, normalisasi hubungan dengan Israel tersebutpun juga disusul oleh Bahrain dan Sudan. Jika dilihat sebelumnya, tentunya normalisasi hubungan negara-negara anggota Liga Arab tidak mungkin dengan tangan kosong, hal tersebut dibuktikan adanya alur perdagangan senjata sebagai pertimbangan penting dari kesepakatan normalisasi. Dengan menjadi sekutu Amerika, maka Uni Emirat Arab,

Bahrain, serta Israel bisa mendapat akses bantuan pertahanan dari Amerika, dilihat pada data penjualan senjata pada 2019 (pra-normalisasi) perdagangan senjata Amerika Serikat sudah meningkat 42 persen atau setara US\$70 miliar (Rp990 triliun). Selain perdagangan senjata, keuntungan lain adalah diplomasi tradisional. Wakil Presiden dari lembaga Center for Strategic and International Studies, Jon Alterman, menyebut normalisasi hubungan antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain akan menyederhanakan diplomasi di Timur Tengah (Sekarwati, 2020). Menyederhanakan diplomasi di Timur Tengah ini maksudnya adalah lebih mudahnya terjadi kerjasama dibanding ketika sebelum terjadinya normalisasi karena masih adanya rasa keterikatan dan “tembok pembatas” antara negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain ini karena rasa solidaritasnya dengan Palestina.

Dalam Islam, hubungan dan perjanjian internasional dijalin untuk menegakkan hukum dan ketertiban di dunia. Hal ini penting agar semua orang dari berbagai budaya dan keyakinan dapat hidup damai tanpa takut terjadi penindasan. Muhammad Sebagai Negarawan, prinsip paling fundamental dalam sebuah jalinan antarnegara ialah menghormati kesepakatan dan fakta perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati tidak boleh dilanggar oleh kubu Muslim. Sebaliknya, bila pihak kedua melanggarnya maka kaum Muslim berhak keluar dari kesepakatan perjanjian tersebut. Dicontohkan Rasulullah SAW, ketika membangun hubungan diplomatik luar negeri, terdapat tiga kategori negara. Kebijakan luar negeri yang diterakan Nabi SAW, disesuaikan dengan karakter dan identitas setiap negara. Kategori yang pertama ialah negara Muslim. Prinsip hubungan kerja sama antarnegara Muslim didasari fakta bahwa sesama Muslim bersaudara. Perbedaan suku, ras, dan bahasa, tak menjadi penghalang. Dalam suatu hadis ditegaskan bahwa semua Muslim adalah satu. Seorang Muslim berhak mendapatkan jaminan perlindungan. Penegasan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, “Kami telah melindungi orang yang engkau lindungi, duhai Ummu Hani.” Sikap ini juga dipertegas oleh Umar bin Khatab (Nasrullah, 2017).

Berkaitan dengan konteks keputusan para negara Liga Arab yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel memang tidak dengan tangan kosong, melainkan ada keuntungan yang diterima oleh negara-negara tersebut seperti misalnya pencabutan status Sudan dari tuduhan Amerika Serikat yang mengatakan Sudan sebagai negara pendukung Terorisme di Timur Tengah. Adanya aliran perdagangan senjata dari Amerika Serikat kepada UEA dan Bahrain. Akan tetapi tetap saja, ini membuktikan bahwa lemahnya konsistensi Liga Arab dalam mengarahkan Internalnya sendiri, sehingga terkesan hilang fungsi dan kepercayaan terhadap organisasi regional ini.

### **Kesimpulan**

Liga Arab telah aktif dalam membantu dunia Arab mengembangkan perekonomian dan budaya, sekaligus menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik baik di dalam liga maupun dari eksternal. Organisasi ini berusaha untuk menyelesaikan isu-isu yang muncul antara Negara-negara Arab, dan untuk memperbaiki citra keseluruhan negara-negara muslim di dunia saat ini. Organisasi Liga Arab memiliki kesempatan untuk memainkan peran diplomatik yang signifikan dalam mendorong status kenegaraan Palestina di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan pemberontakan di banyak negara Arab di awal tahun 2010-an. Beberapa pengamat memuji tindakan Liga Arab selama revolusi 2011 di Libya, di mana ia mendukung penggulingan Muammar al-Qaddafi.

Namun gejala baru dalam diplomasi Liga dalam kasus Libya dan Suriah menuai kritik yang substantif. Adanya standar Ganda seolah diterapkan karena kepentingan atas negara-negara anggota. Dan kemudian Liga Arab seolah organisasi regional yang belum mampu mengakomodir negara-negara anggotanya terutama dalam kesepakatan dan untuk menaati kesepakatan tersebut, contohnya dalam konflik antara Palestina dan Israel dimana awalnya para anggota sepakat tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, namun faktanya beberapa negara anggota melakukan hal tersebut dengan alasan kepentingan negaranya. Ini

memperlihatkan bagaimana sebenarnya belum adanya keberhasilan dari Liga Arab dalam mengimplementasikan nilai politik ataupun diplomasi yang dipraktikkan Rasulullah.

## Referensi

### Buku dan Jurnal

- Ahmad, A. Y. (2016). Introduction to a general reading of the Arab scene. *Contemporary Arab Affairs*, 9(4), 493–510. <https://doi.org/10.1080/17550912.2016.1201932>
- Al-Marashi, I. (2018). The Arab league: Between ambitions and reality. *Orient*, 59(1), 39–46.
- Ammash, O. S. (2015). Arab League Submit Report. *Global Political Trends Center (GPoT)*, 1-4.
- Ardhiyanto, D. (2014). Kebijakan Liga Arab dalam Konflik Suriah : Studi Kasus Dukungan Liga Arab pada Pihak Oposisi Suriah Tahun 2013. *UIN Jakarta*.
- Ahmad, A. Y. (2016). Introduction to a general reading of the Arab scene. *Contemporary Arab Affairs*, 9(4), 493–510. <https://doi.org/10.1080/17550912.2016.1201932>
- Al-Marashi, I. (2018). The Arab league: Between ambitions and reality. *Orient*, 59(1), 39–46.
- Al-Muallem, M. (2020). The league of Arab States and the United Nations: A reading in the relation between both sides from 2000-2020. *Voprosy Istorii*, 2020(10–3), 253–257. <https://doi.org/10.31166/VoprosyIstorii202010Statyi55>
- Barnidge, R. P. (2018). Anti-Zionism, Jus Cogens, and international law: The case of the Banjul Charter and Arab Charter. *Journal of the Middle East and Africa*, 9(1), 77–92. <https://doi.org/10.1080/21520844.2018.1449796>

- Bidabad, B. (2011). Foundations of international relations: An Islamic Sufi approach. *International Journal of Law and Management*, 53(5), 313–341. <https://doi.org/10.1108/17542431111166322>
- Bidabad, B. (2012). Diplomacy principles: An Islamic Sufi approach – continuation. *International Journal of Law and Management*, 54(6), 422–442. <https://doi.org/10.1108/17542431211281936>
- Debre, M. J. (2020). Legitimation, regime survival, and shifting alliances in the Arab League: Explaining sanction politics during the Arab Spring. *International Political Science Review*. <https://doi.org/10.1177/0192512120937749>
- Lundgren, M. (2020). Causal mechanisms in civil war mediation: Evidence from Syria. *European Journal of International Relations*, 26(1), 209–235. <https://doi.org/10.1177/1354066119856084>
- Ozkan, M. (2014). Turkey’s religious diplomacy. *Arab World Geographer*, 17(3), 223–237.
- Rickenbacher, D. (2020). The Arab League’s propaganda campaign in the us against the establishment of a Jewish State (1944-1947). *Israel Studies*, 25(1), 1–25. <https://doi.org/10.2979/israelstudies.25.1.01>
- Surwandono, Astuti, T. R., & Meiliyana, A. (2018). Maqasid al-shariah for The Establishment of international Regime. *Politik Profetik*, 6(2).
- Warsito, T., & Surwandono, . (2015). “Diplomasi Bersih” Dalam Perspektif Islam. *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 16(2), 145–176. [http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/627/pdf\\_32](http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/627/pdf_32)

## Website

- Fahmy, N. (2015, Maret 28). *A Call for Arab Diplomacy*. Diakses melalui The Cairo Review of Global Affair: <https://www.thecaireview.com/essays/a-call-for-arab-diplomacy/>



- Firman, T. (2019, Maret 22). *Sejarah Liga Arab: Tak Banyak Berkutik saat Anggotanya Bertikai*. Diakses melalui Tirto.id: <https://tirto.id/sejarah-liga-arab-tak-banyak-berkutik-saat-anggotanya-bertikai-djuQ>
- Hardoko, E. (2012, Desember 10). *Liga Arab Sepakat Bantu Keuangan Palestina*. Diakses melalui Kompas.com: <https://edukasi.kompas.com/read/2012/12/10/11401886/liga.arab.sepakat.bantu.keuangan.palestina>.
- International Democracy Watch. (2020). *Arab League*. Diakses melalui International Democracy Watch: <http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/arab-league>
- Mukhtar, U. (2020, September 24). *Pendanaan Negara Arab ke Palestina Turun 85 Persen pada 2020*. Diakses melalui Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/qh520q382/pendanaan-negara-arab-ke-palestina-turun-85-persen-pada-2020>
- Nasrullah, N. (2017, Maret 09). *Cara Rasulullah Membangun Hubungan Diplomatik*. Diakses melalui Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/omj0mq313/cara-rasulullah-membangun-hubungan-diplomatik>
- Sanjaya, R. N. (2015, Maret 05). *Memahami Politik Standar Ganda*. Diakses melalui Jama'ah Shalahuddin UGM: <https://js.ugm.ac.id/2015/03/05/memahami-politik-standar-ganda/>
- Sekarwati, S. (2020, Desember 23). *Kaleidoskop 2020: Ramai-ramai Normalisasi Hubungan Israel*. Diakses melalui Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/1415163/kaleidoskop-2020-ramai-ramai-normalisasi-hubungan-israel/full&view=ok>